

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Keberadaan manusia tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Hal ini menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa negara Indonesia negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai sebuah perwujudan keadilan bagi warga negara Indonesia supaya taat terhadap peraturan yang telah dibuat. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.¹

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.² Terdapat beberapa kasus korupsi di Indonesia seperti kasus penyelewengan dana impor daging sapi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3Miliar oleh terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang divonis

¹Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2.

² IGM NURDJANA, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 18

16 tahun penjara.³ Kemudian kasus korupsi terkait proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan, Olahraga Nasional Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 464,5 Miliar oleh terdakwa Andi Alfian Mallarangeng yang dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.⁴ Kemudian kasus yang masih hangat saat ini yakni Penyelewengan dana penyelenggaraan haji yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1 triliun oleh tersangka Suryadarma Ali yang tidak lain menjabat sebagai Menteri Agama RI.

Berdasarkan kasus di atas saat ini kasus korupsi telah menjadi penyakit nasional dan tentunya merugikan keuangan negara, dapat kita jumpai dalam segala lapisan masyarakat karena kondisi sosial dan Tindak pidana korupsi menjadi salah satu aspek yang membuat tindakan korupsi menjadi tumbuh subur dan bukan lagi merupakan hal yang tabu bagi kalangan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini akhirnya menjadi sebuah budaya, lemahnya penegakan hukum di Indonesia kurang membuat efek jera bagi para pelaku korupsi.

Dalam upaya penegakan dan memeriksa Tindak Pidana Korupsi para pihak terkait telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengungkapannya karena biasanya banyak Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan rapi. Contohnya pada kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin. Artalyta Suryani alias Ayin yang tak berkutik ketika menghadapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memperlihatkan gambar dan rekaman suara hasil penyadapan telepon Ayin dengan Jaksa Urip sebelum transaksi suap

³ Aco Hasanudin, Senin, 9 Desember 2013: PKS Heran Vonis Luthfi Hasan Lebih Berat Dibandingkan Nazaruddin, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/09/pks-heran-vonis-luthfi-hasan-lebih-berat-dibandingkan-nazaruddin>, diakses 24 Juli 2014, Pukul 22.05 WIB.

⁴ Ansar M Adib, Jumat, 18 Juli 2014: Andi Mallarangeng Siap Terima Vonis, <http://www.solopos.com/2014/07/18/kasus-hambalang-andi-mallarangeng-siap-terima-vonis-520257>, diakses 24 Juli 2014, Pukul 22.05 WIB.

sebesar 660.000 dolar AS.⁵ Selain kasus Artalyta Suryani terdapat kasus lain yang terungkap melalui alat bukti rekaman yakni Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuka rekaman sadapan percakapan antara mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban, dan terdakwa kasus korupsi proyek SKRT, Anggoro Widjojo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.⁶

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa pengungkapan Tindak Pidana korupsi melalui alat bukti rekaman suara sangat berpengaruh dan menguatkan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan untuk memperkuat alat bukti di muka persidangan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. KUHAP tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah di undangkannya Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.⁷

Persamaan alat bukti rekaman suara dapat didukung juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

⁵ Yuli Sulistyawan, Senin, 2 Juni, 2008, *Kasus Penyuapan Jaksa dan Mafia Peradilan* dalam <http://Infoindonesiakita.com/2008/06/26/artalyta-kasus-penyuapan-jaksa-dan-mafia-peradilan>, diakses kamis, 24 juli, 2014 pukul 22.05 WIB.

⁶ Rie , Rabu, 28 Mei, 2014, *MS Kaban Sangkal Suara Rekaman Sadapan Adalah Suaranya* dalam Jabar.TribunNews.com/2014/05/28/MS-Kaban-Sangkal-Suara-Rekaman-Sadapan-Adalah-Suaranya, diakses Kamis, 24 juli, 2014, Pukul 22.35 WIB.

⁷ Hukum Online.com, Kamis, 05 Maret 2009: *Alat Bukti Rekaman*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>, diakses Senin, 07 Juli 2014, pukul 23.20 WIB.

menyebutkan bahwa: *“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”*.

Berdasarkan pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan dalam hukum pidana sifat pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki (sebenarnya). Oleh karena itu alat bukti sangat penting di dalam proses pembuktian perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan pengadilan, guna menentukan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindakan pidana atau tidak, dan siapa pelakunya. Jadi tidaklah gampang untuk mencari kebenaran materiil tersebut, karena peristiwanya kadang-kadang sudah lama, ingatan para saksi atas peristiwa yang terjadi sudah lupa, dan lain-lain.

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi didasarkan atas alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP, namun ditambah lagi hasil penyadapan sebagai alat bukti petunjuk yang diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
2. Dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)**.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar penulisan tidak keluar dari pokok pembahasan yang telah penulis tetapkan, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini hanya pada kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah pembahasan masalah yang akan diteliti maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kekuatan hukum dalam pembuktian rekaman suara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia?
3. Apa yang menjadi kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses penyelidikan tindak pidana Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan penyadapan suara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas agar pembahasan lebih terarah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian rekaman suara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan penyadapan suara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

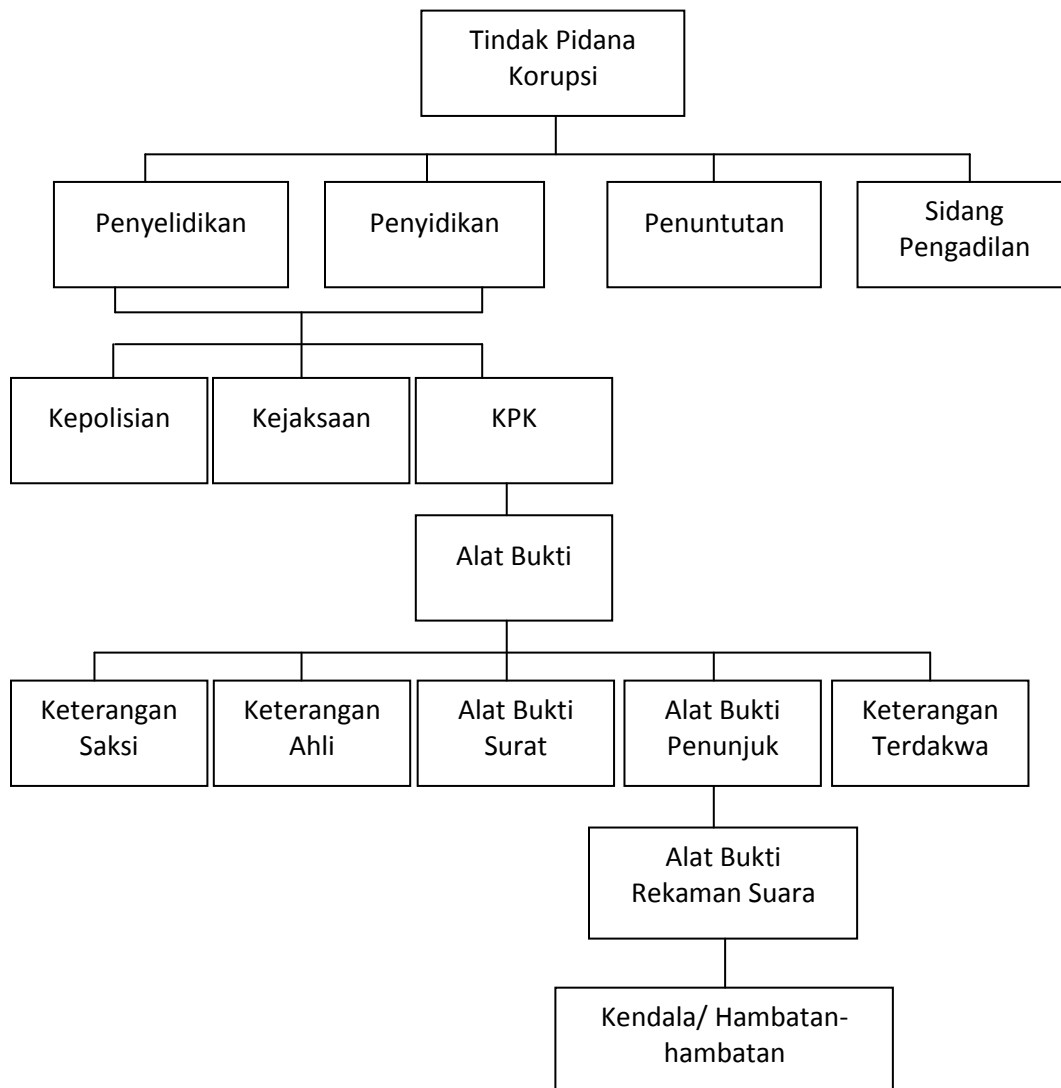
1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya hukum kekuatan bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai wahana pengembangan teori-teori yang Penulis peroleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang kekuatan bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Serta menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

D. Kerangka Pemikiran



Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 1 adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.⁸

Didalam tindak pidana korupsi terdapat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan atau putusan, dalam proses penyidikan dan penyelidikan ada tiga lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Eggi Sudjana mengatakan bahwa pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dilatar belakangi kebutuhan untuk memberantas korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah di golongankan sebagai kejahatan yang luar biasa⁹

Dalam hal ini, penulis mengangkat Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang independen atau berdiri sendiri. Dalam pengungkapan perkara korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diberikan dasar hukum untuk melaksanakan kewenangannya yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana kewenangan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait

⁸ Op.Cit. Hal 1

⁹ Tumbur Ompu Sunggu, 2012, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, Hal. 161.

- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.¹⁰

Salah satu kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pasal 8 ayat (1) ,(2) sendiri ialah mencari alat bukti yang mana telah ditulis didalam KUHAP sebagai hukum acara tindak pidana umum Pasal 184 ayat 1 yang berisi:

- a. *Keterangan saksi,*
- b. *Keterangan ahli,*
- c. *Surat,*
- d. *Petunjuk,*
- e. *Keterangan terdakwa*

Salah satu alat bukti adalah alat bukti petunjuk yang mana dapat mencakup alat bukti rekaman suara, alat bukti rekaman vidio, alat bukt berupa sms, email serta media sosial. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebuah alat bukti rekaman suara dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk mengungkap khusus, untuk menyelidiki seseorang yang diduga merugikan keuangan negara, atau untuk memperkuat alat bukti dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Alat bukti elektronik bukanlah menjadi masalah lagi dalam konteks pembuktian di Pengadilan. Hal tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melakukan berbagai hal di dunia elektronik, termasuk membuktikan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mengalami kekeliruan.¹¹

¹⁰ Ibid. Hal 9

¹¹ Riki Website di 01.12, "Usulan Peneltian (KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SUATU STUDI PERBANDINGAN ANTARA TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KORUPSI)" dalam Jurnal Electronic Evidence and Computer Forensic, Minggu, 20 Desember 2009, <http://tansrik.blogspot.com/2009/12/usulan-peneltian-kekuatan-pembuktian.html> diunduh 18 Agustus 2014, pukul 22:04.

Penggunaan alat bukti rekaman suara telah sah dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Sehingga dapat diketahui pentingnya alat bukti petunjuk khususnya alat bukti rekaman suara bagi pengungkapan kasus Tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Hasilnya dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi. Yang kedua adalah untuk mendeskriptifkan secara terperinci fenomena sosial tertentu, umpamanya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain.¹²

Dengan demikian disini penulis akan mendeskriptifkan tentang Kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses tindak pidana korupsi khususnya pada proses penyelidikan

2. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengidentifikas dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perspektif perundang-undangan maupun praktik di masyarakat. Dimana penulis menganalisa perundang-undangan yang mengatur

¹² Soleman B. Taneko, 1990, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 108

tentang alat bukti rekaman suara dalam penyelidikan Tindak pidana dan realita penerapannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi yang dipilih penulis dalam melakukan riset skripsi ini adalah di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berkantor di Jakarta, karena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga yang banyak menggunakan alat bukti rekaman suara dalam pengungkapan kasus Tindak pidana korupsi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud lapron, dan sebagainya.¹³

Adapun Penelitian Hukum ini berasal dari data sekunder yakni bahan-bahan pustaka yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

¹³ Amirudun & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal 30

- c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik
- e) Doktrin.
- f) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum, hasil-hasil penelitian dan artikel koran serta bahan lain yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap yang menunjang proses pengumpulan data, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*).

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada staf-staf yang bertugas di Komisi Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan alat bukti rekaman suara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menggunakan cara studi dokumen, yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan yang menunjang berkaitan dengan obyek

penelitian tentang bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, dan buku maupun catatan kuliah.

6. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data diperlukan teknik analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis tujukan terhadap kasus-kasus yang tidak dapat disusun kedalam sebuah kategoris,¹⁴ yakni Kekuatan Alat bukti Rekaman Suara Dalam Proses Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan kualitas mutu dan sifatnya yang nyata berlaku dalam masyarakat, untuk disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, dapat dibagi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Tinjauan pustaka ini, dimana dalam penulisan hukum ini memberikan kajian-kajian teoritis tinjauan umum tentang alat bukti rekaman suara, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan tinjauan umum tentang komisi pemberantasan korupsi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai bagaimana kedudukan alat bukti rekaman

¹⁴ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hal. 121

suara dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, apa yang menjadi kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses penyelidikan tindak pidana Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan penyadapan suara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

BAB IV: PENUTUP. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran.